

KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

Shinta Prastyanti

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Jenderal Soedirman

Email: Shinta_prastyanti@yahoo.com

ABSTRACT

Poverty and rural area like two sides of coins, one of each other can not be separated. It seems rural area always be connected with poverty, even though actually rural area has an incredible human and natural resources. If it is all managed well, the city will be left behind the rural. Many rural development programs have been done, but in the fact they have not able to answer and to give the best solution to poverty matter in rural area. According to the result of this study that phenomenon is at least caused by several things such as: the policy which is not enough to support agrarian sector, the limited of bargaining position into around environment, the limited ability of the country in creating and implementing development, and also strong principle of the people.

Key words: poverty, rural development

PENDAHULUAN

Tidak seorangpun di dunia ini yang ingin menjadi miskin. Berbagai strategi bertahan hidup dilakukan untuk tidak menjadi miskin ataupun terperangkap dalam kemiskinan, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Kemiskinan di pedesaan bukan hanya sekedar masalah personal dan pemerintah desa, akan tetapi juga menjadi problem bagi negara. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan bukan lagi hanya menjadi tanggungjawab pribadi dan lingkungan sekitar saja. Negara harus menempatkan pengentasan kemiskinan di pedesaan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan pedesaan yang harus segera diselesaikan.

“Miskin” seolah-olah sudah menjadi “simbol” yang melekat erat pada masyarakat pedesaan. Kedua kata tersebut seakan-akan merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dan berhubungan satu sama lain. Tapi bukan berarti kemiskinan harus selalu beriringan dengan masyarakat di pedesaan. Pemerintah dan stakeholder-stakeholder terkait sudah banyak melakukan program pengentasan kemiskinan di pedesaan sebagai salah satu bagian dalam pembangunan pedesaan. Akan tetapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri bawa hingga saat inipun masih dengan mudahnya ditemukan masyarakat di pedesaan yang berada dalam kondisi miskin. Dengan kata lain, pembangunan pedesaan yang selama ini dilaksanakan belum mampu sepenuhnya

mengentaskan masyarakat pedesaan dari jurang kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana keterkaitan antara kemiskinan dengan pembangunan pedesaan? Mengapa kemiskinan sangat susah dihilangkan sementara berbagai program pengentasan kemiskinan di pedesaan sebagai bagian dari pembangunan pedesaan sudah dan akan terus dijalankan? Adakah yang salah dalam program pengentasan kemiskinan yang selama ini sudah dilakukan? Seandainya ada yang belum tepat, pada bagian atau tingkatan yang mana? Ataukah memang begitu sulitnya mengenyahkan kemiskinan sehingga diperlukan upaya yang sangat luar biasa untuk mengatasinya? Masih adakah kemungkinan untuk mengentaskan masyarakat pedesaan dari belenggu kemiskinan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas selalu terlintas di benak penulis. Penulis mencoba menganalisisnya melalui studi literasi yang diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menjawab keterkaitan antara kemiskinan dengan pembangunan pedesaan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mencoba mengurainya dengan menganalisis keterkaitan antara kemiskinan dengan pembangunan pedesaan.

PERUMUSAN MASALAH

“Bagaimana keterkaitan antara kemiskinan dengan pembangunan pedesaan sehingga kemiskinan susah dihilangkan di daerah-daerah pedesaan?”

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan Pedesaan

Banyak definisi mengenai kemiskinan yang disampaikan oleh para pakar dari berbagai negara. Masing-masing pendapat memiliki sudut pandang berbeda yang pada dasarnya menurut penulis tidak bisa lepas dari akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Salah satunya disampaikan oleh Mosley (2001) yang lebih menitikberatkan pengertian kemiskinan pada aspek pendapatan serta keberagaman aset yang dimiliki, serta berbagai ukuran yang berkaitan dengan kerentanan. Agak berbeda dengan definisi kemiskinan dari Mosley, Carter (1999) menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan karena sekedar memiliki sedikit aset, tetapi juga kendala-kendala yang harus dihadapi berkaitan dengan kekurangefektifan dalam menggunakan aset tersebut. Sebaliknya Akindola sependapat dengan Mosley, meski dengan memberikan catatan. Akindola (2009) menyatakan bahwa pendapatan merupakan indikator penting dalam melihat kemiskinan, tetapi peningkatan

pendapatan saja bukanlah kondisi yang cukup untuk mengukur kemiskinan. Maksud Akindola di sini adalah kegagalan dalam memberikan definisi yang tepat mengenai kemiskinan justru menyebabkan kecurangmaksimalan upaya pengentasan kemiskinan mengingat definisi kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari akar penyebab dan solusi terhadap kemiskinan itu sendiri. Lebih lanjut Carr (2008) memaparkan bahwa kemiskinan itu sendiri gagal menangkap penyebab dan solusi yang spesifik dan membuat upaya pengurangan kemiskinan tidak memperlihatkan hasil yang signifikan dibanding upaya-upaya sebelumnya yang telah dilakukan.

Perspektif lain juga mengkaitkan kemiskinan dengan kepemilikan tanah. Indikator kepemilikan tanah ini menjadi salah satu poin penting dalam melihat kemiskinan di pedesaan. Keberadaan tanah bagi penduduk pedesaan memang tidak bisa dipisahkan karena tanah merupakan sumber utama pendapatan, bahkan mungkin di banyak keluarga tanah menjadi satu-satunya sandaran pemasukan untuk memenuhi kebutuhan. Pendapat yang lebih mendasar berkaitan dengan kemiskinan dan kepemilikan tanah diutarakan oleh Ellis & Mdoe (2003). Keduanya menyatakan bahwa kemiskinan pedesaan berkaitan dengan

kurangnya tanah dan cadangan sumber pangan seiring dengan ketidakmampuan petani dalam mengamankan sumber pendapatan lainnya di luar sektor agraris. Sejalan dengan Ellis & Mdoe, Fulcher & Scott (1999) berpendapat bahwa orang dikatakan hidup dalam kemiskinan ketika pendapatan yang diperolehnya terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski Fulcher & Scott tidak menyebutkan secara detil berapa jumlah pendapatan yang dimaksud, pendapat keduanya menyiratkan bahwa kebutuhan hidup masing-masing individu dan keluarga adalah berbeda sehingga batasan jumlah pendapatannyapun juga tidak akan sama. Pendapat tersebut mengindikasikan jika kemiskinan itu bersifat personal dan akan sulit untuk menggeneralisirmya. Hal tersebut se suai dengan Townsend (1974) yang menegaskan bahwa kemiskinan hanya bersifat relatif dan tidak akan pernah bisa didefinisikan secara absolut.

Berkaitan dengan kepemilikan aset dan upaya pengentasan kemiskinan seperti yang disampaikan oleh berbagai pendapat di atas, Carter & Barret (2006) merefleksikan bagaimana kemiskinan yang berbasis pada aset dapat digunakan untuk membuat suatu rancangan strategi pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, program pengentasan

kemiskinan tidak berjalan dengan baik ketika cenderung hanya berfokus pada aspek ekonomi saja, yakni meningkatkan pendapatan. Aliber (2003) memberikan sedikit pencerahan bahwa karakteristik dari orang miskin seharusnya menjadi pertimbangan penting berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Makna dari pernyataan Aliber tadi adalah sebuah program pengentasan kemiskinan akan berjalan maksimal ketika memperhatikan aspek komunikasi, dalam hal ini penduduk miskin. Pemahaman karakteristik penduduk miskin menjadikan program pengentasan kemiskinan menjadi tepat guna dan tepat sasaran, dan penduduk miskin tidak hanya semata-mata dijadikan obyek dari program tersebut.

Berdasarkan berbagai parameter di atas, menurut Usman (2004), paling tidak terdapat 2 (dua) perspektif yang biasa digunakan untuk melihat masalah kemiskinan, yakni perspektif kultural dan perspektif struktural/situasional. Perspektif kultural melihat kemiskinan pada 3 (tiga) tingkat, yakni: 1) individual, yang ditandai dengan sikap parochial, apatisme, fatalisme, boros, tergantung dan inferior; 2) keluarga, ditandai dengan jumlah keluarga yang besar; 3) masyarakat, ditunjukkan dengan tidak terintegrasikannya kaum miskin dengan

institusi-institusi masyarakat secara efektif. Sedangkan pada perspektif struktural/situasional, kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern.

METODE PENULISAN

Artikel ini merupakan sebuah studi literasi yang bermaksud menjawab tujuan penulisan dengan mengkaji berbagai literatur yang terkait, di antaranya adalah komunikasi pembangunan, kemiskinan, pembangunan pedesaan, dan lain-lain. Melalui studi literasi ini diharapkan penulis memiliki keleluasaan dalam menggali dan mengkaji fokus permasalahan secara mendalam dan komprehensif sehingga dapat menyajikan pembahasan yang tajam dan mampu mengambil kesimpulan yang akurat. Pada akhirnya diharapkan mampu menghasilkan temuan-temuan yang menarik dan bermanfaat dalam pengembangan kajian Komunikasi Pembangunan dan Pembangunan Masyarakat khususnya di daerah pedesaan.

PEMBAHASAN

Keterbatasan Nilai Tawar Dengan Lingkungan Sekitar

Kemiskinan ternyata tidak hanya mengenai ketidakmampuan dalam memenuhi

kebutuhan hidup dan kepemilikan tanah, namun juga beriringan dengan keterbatasan akses pada lingkungan sekitar. Berkaitan dengan hal tersebut, Chambers (1983) berpendapat jika penduduk pedesaan juga harus berjuang melawan 5 (lima) ketidakberuntungan yang saling terkait yang menjebakny ke dalam ketidakmampuan. Ketidakberuntungan tersebut adalah: kemiskinan itu sendiri, kelemahan secara fisik, terisolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan yang dimaksud di sini bukan saja terbatasnya kepemilikan aset, namun lebih pada posisinya di antara lingkungan sekitar.

Selain beberapa faktor yang menjadikan penduduk di pedesaan tidak beruntung, keberadaan kaum elite desa ternyata juga memiliki peran yang signifikan dalam persoalan kemiskinan di pedesaan. Para elit desa yang notabene memiliki akses yang lebih luas dan terbuka dibanding penduduk desa lainnya diharapkan mampu memberikan/membantu upaya pengentasan kemiskinan dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitarnya. Namun acapkali kenyataannya justru sebaliknya. Kaum elit bukannya memberikan stimulus guna meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin di pedesaan sehingga memiliki daya

yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun para elit ini justru malah bertindak sebagai jaring yang mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Di sisi lain si -miskin tetap saja tidak memiliki kemampuan daya tawar. Dampaknya adalah kaum elite pedesaan yang sudah memiliki kekuasaan yang lebih besar menjadi semakin kaya dan berkuasa, sementara kaum miskin semakin sulit untuk dapat terlepas dari jerat kemiskinan yang salah satunya diciptakan dan diperlebar oleh kaum elit pedesaan itu sendiri. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Melkote & Steves menyatakan pendapat yang senada. Kedua pakar ini menyampaikan bahwa kelompok-kelompok tertentu di daerah-daerah pedesaan mendapatkan barang-barang dan jasa yang lebih baik dibanding kelompok lainnya, sehingga menciptakan kelas sosial yang berbeda di daerah tersebut (Melkote & Steves, 1991).

Kebijakan Yang Kurang Mendukung Bidang Pertanian

Selain "peran serta" kaum elit pedesaan dalam melestarikan kemiskinan, ternyata kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional yang tidak meletakkan pertanian sebagai dasar ekonomi nasional juga ditengarai turut andil dalam melanggengkan kemiskinan

di pedesaan. Rendahnya upah, keterbatasan lahan subur, berubahnya area-area pertanian menjadi non pertanian, meningkatnya pengangguran, dan sebagainya, menyebabkan daerah-daerah pedesaan tetap menjadi pusat dari kantong-kantong kemiskinan (Suhariyanto, 2007).

Kebijakan yang kurang menitikberatkan pada sektor pertanian ini mengakibatkan sulitnya penduduk pedesaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengingat sektor pertanian tidak lagi dapat menjadi ladang penghasilan baginya. Padahal sejak turun-temurun sektor-sektor pertanian ini telah menjadi tumpuan pendapatan bagi masyarakat di pedesaan, bahkan bisa jadi satu-satunya sumber penghasilan. Perubahan sumber pendapatan ini tidak hanya berpengaruh pada diri masyarakat di pedesaan, namun ternyata juga berdampak pada skala nasional. Rigg (2006) menegaskan bahwa pertanian sebagai sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk pedesaan tidak lagi menjadi pondasi bagi ekonomi nasional.

Ketergantungan pada sumber daya desa khususnya sektor agraris di sisi lain justru akan mematikan potensi dan peluang untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, mengingat banyak potensi lain di pedesaan yang bisa digali dan dikembangkan selain dari

aspek agraris. Dampak lain dari kebijakan yang tidak pro pertanian dan pengentasan kemiskinan adalah migrasi. Menurut Wilkinson, et.al (2010), kemiskinan juga akan mengakibatkan migrasi dan perdagangan manusia (trafficking). Perpindahan penduduk desa ke tempat lain tanpa disertai dengan *skill* yang memadai tentu saja hanya akan menimbulkan *slum-slum area* di tempat baru tersebut. Berkaitan dengan dampak migrasi, Lerner (dalam Nasution, 2002) juga menyatakan hal yang serupa. Tetapi Lerner lebih menekankan pada urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, sementara Wilkinson, et.al tidak menyebutkan secara spesifik mengenai perpindahan dari desa ke kota.

Untuk mengurangi persoalan tersebut diatas, diversifikasi sumber penghasilan diharapkan dapat menopang kehidupan penduduk pedesaan sehingga tidak hanya bertumpu pada satu sumber pendapatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Ellis (2000) dan Carney (1998) menyampaikan bahwa *Livelihood diversification* merupakan suatu proses dimana sebuah keluarga membuat konsep yang berbeda atas katifitas-aktifitas dan kemampuan sosial yang dimiliki dan dijalankannya guna mendukung upaya untuk bertahan hidup dan meningkatkan standar

kehidupan. Shultz (dalam Ellis & Biggs, 2001) juga menekankan bahwa sebenarnya petani dengan lahan sempitpun merupakan seorang individu yang rasional. Serta efisien dalam mengambil keputusan berkaitan dengan tanah. Kemampuan dalam mentransfer aset yang dimiliki ke dalam kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan didasarkan pada kriteria yang mereka miliki sendiri (Bebbington, 1999).

Keterbatasan Negara Dalam Merancang dan Mengimplementasikan Pembangunan

Banyaknya definisi mengenai kemiskinan yang berakibat pada susahnya mencari penyebab kemiskinan, serta kebijakan pemerintah yang kurang pro pertanian menjadi indikator sulitnya upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. Pendapat yang senada disampaikan oleh Kay (2011) yang menyatakan bahwa penyebab kemiskinan susah diketahui ketika negara masih memiliki keterbatasan untuk mendesign dan mengimplementasikan pembangunan itu sendiri. Sayangnya Kay tidak menjabarkan secara lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan negara dalam menjalankan fungsinya, yakni merancang sebuah pembangunan dan melaksanakannya. Namun demikian tidak dapat dipungkiri jika kebijakan yang diambil oleh negara dalam hal

ini pemerintah akan sangat berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan. Berkaitan dengan pendapat Kay, Khan (2000) menyampaikan bahwa kerangka kebijakan yang diambil oleh pemerintah memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya mengenai transfer aset, investasi dan akses kepada infrastruktur baik fisik maupun sosial, kredit dan lapangan pekerjaan, dan juga ketersediaan jaring pengaman sebagai indikator yang penting dari kerangka kerjanya.

Pendapat-pendapat tersebut di atas memang melihat keterkaitan antara kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi dari beberapa pendapat tadi tidak memberikan fokus penekanan secara khusus pada upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan mengingat desa dan masyarakatnya memiliki karakteristik khusus yang tidak bisa disamakan dengan kota.

Prinsip Yang Mengakar

Sebenarnya program pembangunan pedesaan yang bermuara pada pengentasan kemiskinan sudah berlangsung sejak beberapa dekade yang lalu. Di satu sisi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama *stakeholder* lainnya tidak akan dapat berjalan maksimal apabila partisipasi dari masyarakat

kurang maksimal. Salah satu penyebab adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan pedesaan khususnya pengentasan kemiskinan, sehingga acapkali masih harus berhadapan dengan pandangan/prinsip masyarakat yang seringkali kurang memberikan kontribusi yang positif bagi upaya pengentasan kemiskinan pedesaan. Prinsip "Nrimo Ing Pandum dan Mangan Ora Mangan Kumpul" di satu sisi menumbuhkan sikap bersahaja dan mengutamakan kebersamaan keluarga serta menerima saja apa yang telah diberikan oleh Tuhan dengan rasa syukur dan tidak mengharapkan lebih dari itu. Padahal jika orang lain melihat kondisinya serba kekurangan, miskin, dan tidak berdaya. Di sisi yang lain sikap nrimo tadi dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak bersedia berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan yang di antaranya bertujuan meningkatkan kualitas hidup.

Prinsip-prinsip di atas tentu saja menjadi kendala tersendiri bagi upaya pengentasan kemiskinan. Padahal sebenarnya masyarakat di pedesaan memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang, termasuk mengurangi angka kemiskinan di pedesaan. Masyarakat sejatinya dapat dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Penempatan masyarakat sebagai pusat pembelajaran ini dapat menjadi

sebuah model dalam upaya pengentasan kemiskinan pedesaan. Kelembagaan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembelajaran dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan perhatian secara khusus kepada kelompok-kelompok perempuan di pedesaan yang miskin. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut ternyata dapat memfasilitasi perbaikan kondisi sosial masyarakat, baik secara politik maupun ekonomi (Alam, 2006).

Pola-pola pemberian kekuasaan pada tataran masyarakat sebagai wujud pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai yang berpusat pada manusia tersebut di atas menjadikan masyarakat lebih terlatih dalam mengelola sumber daya produktif yang dimilikinya melalui pemberian kekuasaan (Usman; 2004). Pemberian kekuasaan ini (pemberdayaan) menumbuhkan kekuatan dan keyakinan akan keberlanjutan partisipasi masyarakat pada program pengentasan kemiskinan di pedesaan. Kekuatan dan keyakinan tersebut tentu saja tidak hanya pada tataran individu atau keluarga, namun merupakan bentuk kesadaran pada tingkat komunitas (Kwiatkowski, 2005). Chaskin (2001) menyatakan bahwa penguatan kapasitas masyarakat diekspresikan baik secara eksplisit maupun implisit dalam retorika, misi dan

aktifitas - aktifitas upaya pengembangan masyarakat saat ini Meskipun demikian, keterlibatan individu secara aktif dalam mengatasi problematika yang ada dalam suatu komunitas merupakan sebuah bentuk dari partisipasi masyarakat (Ohmer, 2007) Senada dengan Ohmer, Itzhaky dan York (2002) menegaskan bahwa partisipasi berkorelasi dengan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, selain juga dapat meningkatkan kebutuhan diri. Maton (2008) sependapat dengan kedua pendapat sebelumnya. Menurutnya kelompok-kelompok akar rumput dapat memperoleh kontrol yang lebih besar atas kehidupan dan lingkungannya, mendapatkan sumber daya, penghargaan atas hak dasar, serta dapat mencapai tujuan hidup dan mengurangi ketimpangan sosial.

KESIMPULAN

1. Kemiskinan dan pedesaan seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun demikian bukan berarti kemiskinan tidak dapat dilenyapkan dari wilayah pedesaan.
2. Pemahaman mengenai kemiskinan yang masih kurang menyebabkan sulitnya mencari penyebab dan solusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di pedesaan. Kesulitan tersebut bisa dipahami mengingat

hingga saat ini belum ada definisi mengenai kemiskinan yang bersifat absolut.

3. Kurang maksimalnya program pengentasan kemiskinan di pedesaan sebagai salah satu bagian dari pembangunan pedesaan merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang kurang mendukung bidang pertanian, selain keterbatasan pemerintah dalam membuat design dan mengimplementasikan pembangunan.
4. Faktor yang berasal dari masyarakat berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di pedesaan adalah masih mengakarnya prinsip masyarakat yang menerima keadaan dengan ikhlas/nrimo sehingga dapat menjadi kendala dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan di pedesaan. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkuasanya para elit desa mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri sehingga menjadikan penduduk miskin tidak memiliki *bargaining position*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akindola, Rufus B. 2009. Towards a Definition of Poverty. Poor People's Perspectives and Implications for Poverty Reduction. *Journal of Developing Societies* April/June 2009 vol. 25 no. 2 121-150
- Aliber, Michael. 2003. *Chronic Poverty in South Africa: Incidence, Causes and Policies*. *World Development*, Vol 31, Issue 3
- Bebbington, Anthony, 1999. *Capitals and Capabilities: A Framework for Analyzing Peasant Viability, Rural Livelihoods and Poverty*, *World Development* Vol. 2, No. 12
- Carney, Diana, 1998. *Implementing the Sustainable Rural Livelihood Approach*, Ch. 1 in D. Carney (ed), *Sustainable Rural Livelihoods: What Contribution Can We Make?*, London: Department for International Development
- Carter, Michael R. 1999. *Poverty, livelihood and class in rural South Africa*. *World Development*, Vol 27, Issue 1
- Carter, Michael R & Christopher B Barret. 2006. The economics of poverty traps and persistent poverty: An asset-based approach. *Journal of Development Studies*, Volume 42, Issue 2
- Carr, Edward R. 2008 .Rethinking poverty alleviation: a 'poverties' approach. *Development in Practice*, Volume 18, Issue 6
- Chambers, R , 1983. *Rural Development: Putting The Last First*. Essex: Pearson Education Limited
- Chaskin, RJ. 2001. Building Community Capacity. A Definitional Framework and Case Studies from a Comprehensive Community Initiative. *Journal of Urban affairs Review*. Volume 36, No. 2.
- Ellis, Frank & Ntengua Mdoe. 2003. *Livelihoods and Rural Poverty Reduction in Tanzania*. *World Development*. Volume 31, Issue 8
- Ellis, Frank, 2000. *Household Strategies and Rural Livelihood Diversification, on the Policy Implications of Rural Livelihood Diversification*, ESCOR, Department for International Development
- Ellis, F dan Biggs, S, 2001. *Evolving Themes in Rural Development 1950s-2000s, forthcoming in Development Policy Review*
- Fulcher, James & John Scott, 1995. *Sociology*. Oxford: Oxford University Press
- Itzhaky, H., & York, A. S, 2002. *Showing results in community organization*. *Social Work*, 47,
- Kay, Cristobal. 2011. Rural Poverty Reduction Policies in Honduras, Nicaragua and Bolivia: Lessons from a Comparative Analysis. *European Journal of Development Research* (2011) 23
- Khan, MH. 2000. *Rural Poverty in Developing Countries Issues and Policies*. IMF Working Paper No. 00/78
- Kwiatkowski, L. 2005. *NGOs, Power and Contradiction in Ifugao, the Philippines, Urban Anthropology & Studies of Cultural Systems & World Economic Development*, Vol. 34.
- Maton, Kenneth I. 2008. Empowering community settings: gents of Individuals Development, Community Betterment, and Positive Social Change. *Ammerican Journal of Pshychology*, Volume 41, Number 1 -2)

- Melkote, Srinivas & H. Leslie Steves. 1991. *Communication For Development in the Third World. Theory and Practice For Empowerment, 2nd edition*. Sage Publications: New Delhi
- Mosley, P, 2001. Microfinance and Poverty in Bolivia. *Journal of Development Studies, Volume 37, Number 4, April 2001* , pp. 101-132(32)
- Nasution, Zulkarimein, 2002. *Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Ohmer, Mary L, 2007. **Citizen Participation in Neighborhood Organizations and Its Relationship to Volunteers' Self- and Collective Efficacy and Sense of Community**, *Social Work Research*, Vol. 31
- Rigg, Jonathan, 2002. *Grass-root development in rural Thailand: a lost cause? . World Development*. Volume 19 Issues 2-3
- Suhariyanto, Kecuk. (2007). *Kinerja dan Perspektif Non Pertanian Dalam Ekonomi Pedesaan*. Paper presented at National Seminar on Agriculture and Rural Development 4 Desember 2007
- Towsend, P, 1974. 'The Concept of Poverty', in D. Wedderburn (ed). *Poverty, Inequality and Class Structure*. Cambridge: Cambridge University Press
- Wilkinson, Mick, Gary Craig and Aline Gaus. 2010. *Forced labour and the Gangmaster's Licensing Authority*. Hull/Manchester: Oxfam/WISE

